

**DAMPAK KEBERADAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN  
(TPI) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN  
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI  
KELURAHAN BENTENGNGE KECAMATAN UJUNG BULU  
KABUPATEN BULUKUMBA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**WITA DWI ASTUTI WAHID**  
NIM. 60800111074

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan judul “**Dampak Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bentengge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba**”. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, seerta doa tercurah kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan rangkaian sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Teknik serta menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis dengan lapang dada sangat mengharapkan masukan-masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis melalui kisah perjalanan panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan serta kritik konstruktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda Drs. Abd Wahid dan ibunda Fatmawaty Wahid atas kasih sayang, dukungan dan serta lantunan doanya disetiap sujud beliau yang tak pernah putus hingga saat ini.
3. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta staf fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ketua dan Sekretaris jurusan Teknik Perencanaan Wilayah & Kota – FST UIN Alauddin Makassar.
5. Dewan Pembimbing ibu Dr.Ir. Mislihah Idrus MTr dan bapak Nursyam AS,ST.,M.Si yang telah membimbing dengan penuh rasa ikhlas dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dewan Penguji ibu Risma Handayani, S.IP., M.Si, bapak Juhanis, S.Sos., M.M dan bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
7. Kepada bapak Lurah Bentengnge serta masyarakat di Kelurahan Bentengnge yang telah memberikan banyak informasi serta bantuannya selama proses penelitian berlangsung
8. Saudara-saudara penulis Dafiq Ady Wawan Wahid, SH, Latifatul Muthmainnah,Amd.AK, A. Tri Hendra Gunawan Wahid dan A. Muh Gibran Arafat Wahid yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat penulis Zulhan Khalid dan Yuyun Iskandar Abbas yang selalu memberikan semangat, motivasi dan setia membantu penulis, yang selalu

menemani dari mahasiswa baru hingga sekarang. Semoga kalian segera menyusul untuk menambahkan gelar dibelakang nama kalian.

10. Rekan dari SMA hingga sekarang Bimo Adji Widianoro, ST, Arief Hidayat, ST., MT dan kakanda Despry Nur Annisa, ST yang selalu membantu, memberikan pemahaman selama penyusunan tugas akhir ini.
11. Keluarga dan sahabat penulis yang telah banyak memberikan bantuan selama penelitian ini berlangsung yang tak dapat penulis tuliskan satu persatu.
12. Rekan-rekan jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, terkhusus kepada rekan-rekan P.E.T.A 011 yang selalu menemani melewati susah senangnya dibangku kuliah, selalu memberikan semangat dan tetap solid.

Sebagai insan biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis jika skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Samata-Gowa, 22 Agustus 2016

**Wita Dwi Astuti Wahid**

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Wita Dwi Astuti Wahid**

**NIM : 60800111074**

**Judul Skripsi : Dampak Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba**

---

Kawasan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik dan menyimpan berbagai sumber daya alam yang besar dan tentu dapat dikelola guna memenuhi kebutuhan dan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah dampak dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge terhadap pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air dan persampahan) dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat (mata pencaharian, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data jalan, listrik, air bersih dan persampahan dari instansi sebelum dan setelah adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta hasil kuesioner mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan setelah adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis pembobotan.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge membawa dampak positif baik itu terhadap pembangunan infrastruktur maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

***Kata Kunci : Dampak, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Infrastruktur, Sosial Ekonomi***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kawasan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah barat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut dan pasang surut. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik dan menyimpan berbagai sumber daya alam yang besar dan tentunya dapat dikelola guna untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan sebagai pendapatan daerah bahkan sebagai penghasil devisa negara dan di samping itu kawasan pesisir pula telah menjadi tempat atau pusat dari kegiatan masyarakat, hal itu dibuktikan dengan banyaknya kota atau daerah berkembang di daerah pesisir (Azhar Hidayat, 2012).

Sehubungan dengan hal di atas, Al-Quran telah menjelaskan bahwa hasil laut harus dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam surah QS al-Maaidah/5:96 yang berbunyi :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَايَةِ وَلِلْغَايَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا  
دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

*Terjemahannya:*

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS al-Maaidah 5 : 96)*

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menghalalkan manusia untuk berburu binatang-binatang laut, bahkan mengkonsumsi daging binatang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. Tidak ingin menutup jalan bagi manusia untuk memanfaatkan hewan laut, karena masih banyak makanan lain yang dihalalkan oleh Allah. Pada dasarnya perintah Allah swt. itu merupakan ujian dari kadar taqwa dan ketaatan seseorang. Dengan demikian dapat diketahui kadar kepatuhan terhadap perintah Allah atau manusia itu ingin mengikuti hawa nafsu. Itulah mengapa Allah swt. menutup satu jalan, tapi membuka jalan-jalan yang lain. Dari ayat tersebut terdapat tiga pelajaran yang dipetik : hasil-hasil laut diperuntukkan bagi semua orang, berburu hewan dibolehkan dengan catatan untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk bersenang-senang, dan di hari kiamat, semua makhluk hadir di pengadilan Allah dan pelanggaran manusia merupakan dosa dan tak patut dilakukan.

Kabupaten Bulukumba mempunyai luas sekitar 1.154,7 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,4 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Jika ditinjau dari segi geografis Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Kabupaten yang sangat berpotensi dari aspek kelautan dan perikanan. Potensi perikanan di Kabupaten Bulukumba di Kabupaten Bulukumba terdiri dari perikanan tangkap (perikanan laut) dan perikanan budidaya (perikanan darat). Secara umum, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan produksi.

Kecamatan yang mengalami peningkatan produksi paling tinggi adalah Kecamatan Ujung Bulu yakni sebesar 34,91%, disusul Kecamatan Herlang 12,77% dan Kecamatan Kajang 7,60%. Peningkatan produksi paling tinggi pada Kecamatan Ujung Bulu dikarenakan Kecamatan ini merupakan Ibu Kota

Kabupaten Bulukumba, sehingga di wilayah kecamatan Ujung Bulu terdapat pangsa pasar yang bagus untuk pemasaran produksi perikanan.

Untuk mendukung kegiatan perikanan di Kecamatan Ujung Bulu maka dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang lebih tepatnya berada di Kelurahan Bentengnge. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sama halnya dengan kegiatan industri yang membutuhkan infrastruktur dengan kualitas tinggi. Karena infrastruktur sangat berperan dalam aktivitas di Tempat Pelabuhan Perikanan (TPI). Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) seyogyanya dapat membawa dampak positif dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang pastinya juga akan berimbas pada peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Sebelum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Bulukumba seharusnya tingkat pembangunan infrastruktur dari segala aspek sudah baik. Akan tetapi peningkatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bentengnge tidak signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat pembangunan beberapa aspek infrastruktur di Kelurahan Bentengnge yang tidak bersinergi. Terlebih dengan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang di mana menarik bangkitan kegiatan di Kelurahan Bentengnge yang tentu saja membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tidak signifikannya tingkat pembangunan di Kelurahan Bentengnge dapat dilihat tumpukan sampah yang tidak diangkut. Sampah-sampah yang bertumpuk di beberapa kontainer tersebut tidak diangkut karena aksesibilitas ke wilayah tersebut yang tidak lancar.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menghasilkan timbulan sampah baik dari aktivitas (pendaratan dan pelelangan) Tempat Pelelangan Ikan



(TPI) dan masyarakat sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi persoalan yang cukup serius. Tidak hanya berhenti pada permasalahan persampahan, akan tetapi infrastruktur air bersih dan listrik tentu saja menjadi pertimbangan yang serius. Hal ini karena keempat aspek tersebut merupakan kebutuhan wajib/pokok masyarakat.

Dampak dari tidak tersedianya infrastruktur dan kualitasnya yang rendah menyebabkan laju tingkat ekonomi menjadi melambat atau buruk yang juga akan berimbas pada tingkat sosial masyarakat itu sendiri. Pembangunan infrastruktur yang baik berupa transportasi (jalan), jaringan listrik, instalasi listrik dan persampahan sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.

Masyarakat pesisir identik dengan masyarakat yang dinilai kadang lebih terbelakang daripada masyarakat di daerah lainnya dalam hal perekonomian. Padahal mereka seharusnya dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena begitu banyaknya sumber daya laut yang dapat mereka kelola. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Bentengnge. Masih banyak masyarakat di Kelurahan Bentengnge yang hidup dengan ekonomi rendah dan berdampak pada kehidupan sosial mereka. Semakin baik tingkat ekonomi masyarakat maka akan semakin baik pula tingkat sosial masyarakat. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan tentu saja akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan menurun pada peningkatan sosial masyarakat itu sendiri. Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tingkat pembangunan infrastruktur yang tidak signifikan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah

maka penulis mengangkat suatu judul yakni “Dampak Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba”.

### **B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge terhadap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana dampak keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba?

### **C. *Tujuan***

Adapun tujuan dalam penelitian berdasarkan latar belakang penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dampak keberadaan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge terhadap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba?
2. Untuk mengetahui dampak dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba?

#### **D. *Manfaat***

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah setempat dan menjadi perhatian yang serius dalam pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian selanjutnya.

#### **E. *Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup materi dan wilayah. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan yang berkaitan dengan identifikasi wilayah penelitian. Sedangkan ruang lingkup spasial membatasi ruang lingkup wilayah kajian.

##### **1. Ruang lingkup materi**

Mengingat rumusan masalah diatas, maka perlu adanya batasan penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan efisien yakni mengungkapkan dan mengkaji tentang dampak dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kelurahan Bentengnge serta dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge.

##### **2. Ruang lingkup wilayah**

Lokasi penelitian sebagai ruang lingkup studi secara administrasi adalah Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

## **F. *Sistematika Penulisan***

Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pembahasan ini membahas tentang pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kumpulan ringkasan dari studi-studi yang dilakukan terhadap berbagai sumber literatur yang dapat mendukung penulisan pembahasan ini meliputi : definisi perikanan, konsep infrastruktur, konsep ekonomi, definisi dan klasifikasi pelabuhan perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan, operasional pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), teori pembangunan infrastruktur, teori pembangunan ekonomi dan pembangunan regional.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi sampel subyek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, variabel penelitian, definisi operasional serta kerangka pikir.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM, HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian serta pembahasan dari hasil metode analisis yang digunakan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Definisi Dampak***

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengertian dampak menurut para ahli yaitu :

##### **1. Hiro Tugiman**

Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.

##### **2. Jotin Khisty & B. Kent Lall**

Dampak merupakan pengaruh – pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.

##### **3. Schemel**

Dampak adalah tingkat kerusakan terhadap tata guna tanah lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan lingkungan tertentu.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

### **1. Pengertian dampak positif**

Dampak adalah keinginan untuk membujuk keyakinan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka atau mendukung keinginannya yang baik.

### **2. Pengertian dampak negatif**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada

orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## **B. *Perikanan***

### **1. Definisi Perikanan**

Perikanan memegang peranan sangat penting dalam peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Istilah perikanan memang bisa membingungkan karena banyaknya definisi yang digunakan baik secara teknis maupun nonteknis.

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI No. 9/1985 dan UU RI No. 31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Sedangkan menurut UU No. 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Umumnya perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi



olahraga, rekreasi (pemancingan ikan), dan mungkin juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan.

## 2. Sejarah Perikanan

Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia dari sejak zaman prasejarah, zaman batu (*stone age*), hingga zaman modern sekarang ini. Bahkan sejak zaman purba (*Homo Erctus* dan *Australophiticus*) ikan telah menjadi menu makanan manusia-manusia purba tersebut. Di Zaman batu, sekitar 5000 tahun yang lalu, penemuan arkeologi di gua Skipshelleren, Norwegia menemukan adanya “Desa Nelayan” pertama di mana perikanan menjadi aktivitas masyarakat setempat untuk memanfaatkan ikan sebagai sumber pangan (Akhmad Fauzi, 2010 : 1).

Salah satu sejarah perdagangan dunia yang tertua yaitu perdagangan ikan *cod* kering dari daerah *Lofoten* ke bagian selatan Eropa, Italia, Spanyol dan Portugal. Perdagangan ikan ini dimulai pada periode Vikingatau sebelumnya, yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun, namun masih merupakan jenis perdagangan yang penting hingga sekarang.

Di India, *Pandyas*, kerajaan Tamil Dravidian tertua, dikenal dengan tempat perikanan mutiara sejak satu abad sebelum masehi. Pelabuhan *Tuticorin* dikenal dengan perikanan mutiara laut dalam.*Paravas*, bangsa Tamil yang berpusat di *Tuticorin*, berkembang menjadi masyarakat yang makmur karena perdagangan mutiara mereka, pengetahuan ilmu pelayaran dan perikanan. (“Perikanan”, 2015).

### C. *Konsep Infrastruktur*

#### 1. **Pengertian Pembangunan Infrastruktur**

Siagian (1994 : 20) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Infrastruktur juga dapat merujuk pada *teknologi informasi*, saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada kelompok – kelompok masyarakat tertentu (“Infrastruktur”, 2015).

Dalam konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, atau kumpulan orang dengan kepentingan umum. Infrastruktur dapat pula mengacu pada sebuah konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx berartikulasi dengan suprastruktur. Infrastruktur sama saja dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana

atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

#### **D. Konsep Ekonomi**

##### **1. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* (*nomos*), atau “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”.

Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.

Berdasarkan pemikiran para pakar ekonomi Islam menurut Akram Khan “Ilmu Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan studi terhadap kesejahteraan (*falah*) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya di bumi berdasarkan kerjasama dan partisipasi”. Menurut Umar Chapra “Ekonomi Islam sebagai suatu cabang

pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat”.

#### **E. *Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***

##### **1. Definisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Tempat Pelelangan Ikan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama dengan penawaran meningkat. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat, definisi ini berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Nomor : 139 tahun 1997; 902/Kpts/Pl.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya

TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah : 1999). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan pusat kegiatan pelabuhan – pelabuhan ikan di darat, yaitu tempat melelang ikan hasil tangkapan dan menjadi tempat pertemuan antar penjual (nelayan atau pemodal) dengan pembeli (konsumen, pedagang atau agen pabrik pengolahan ikan). Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dirancang dengan memperhitungkan pengaruh cuaca daerah pantai. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditempatkan sedekat mungkin dengan dermaga bongkar.

Luas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tergantung pada produksi ikan yang dihasilkan tiap hari, yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini :

$$S = \frac{N}{R \alpha P}$$

Dengan :

S : luas tempat pelelangan ikan (  $m^2$  )

N : banyaknya ikan yang dihasilkan (  $Kg/hari$  )

P : berat ikan hasil tangkapan yang ditangani persatuan luas (  $Kg/m^2$  )

R : jumlah pelelangan yang terjadi dalam satu hari

: rasio luasan yang dipakai untuk tempat ikan dengan luas total tempat pelelangan ikan

## 2. Fungsi dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi *marketing centre*. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan *growth centre* dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah :

- a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang
- b. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- c. Mempermudah pengumpulan data statistik

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Direktorat Bina Prasarana Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa :

- a. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi daripada laju peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan sebagai sentra produksi semakin nyata.
- b. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekuensi kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan lebih efisien.
- c. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi daripada volume pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang harus dipertahankan.

Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah :

- a. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen.
- b. Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.

## ***F. Teori Pembangunan Infrastruktur***

### **1. Definisi Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, di mana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti : pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur seyogyanya

diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar manfaatnya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Beberapa contoh hasil pembangunan infrastruktur di Indonesia contohnya Jakarta (misalnya jalan) terkadang hanya bermanfaat bagi pengguna diluar pejalan kaki saja (tidak adanya trotoar atau adanya alih fungsi trotoar), disisi lain pelaksanaan pembangunannya saling tumpang tindih, misalnya untuk hal-hal yang terkait antara lain : jaringan telepon, listrik, penghijauan, lampu lalu lintas, tugas, kewenangan dan tanggungjawab pelaku pembangunan dan lain-lain. Infrastruktur yang baik adalah berjalan sesuai fungsinya, mampu untuk mendukung dinamika dan meningkatkan ekonomi.

Infrastruktur yang ada bila dilihat dari kacamata saat kegiatan pembangunan berlangsung, nampaknya yang ada adalah sebatas memperbaiki dan merubah semata tanpa memikirkan keselamatan dengan merugikan pihak lain seperti hilangnya/minimnya fasilitas trotoar bagi pejalan kaki dan nampak belum adanya upaya untuk membangun infrastruktur khususnya yang mempunyai kriteria pertahanan seperti : jaringan jalan, komunikasi, kelistrikan, kesehatan, air bersih, pusat konsentrasi masyarakat seperti pasar, stadion, pelabuhan udara dan laut, kawasan industriperumahan, pusat pemerintah dan lain-lain yang mampu berperan dan mendukung, baik pada saat negara dalam keadaan normal maupun darurat.



**a. Pembangunan infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja namun ada juga yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang. Dalam setiap pembangunan jenis infrastruktur yang sudah ada maupun kemungkinannya untuk rencana pengembangan ke depan, sehingga perlunya dibuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), RUTR adalah acuan yang perlu dipahami dan secara konsisten harus dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Sampai saat ini masih sering terlihat dalam setiap pembangunan dan pengembangan infrastruktur berjalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi dengan pemerintah, khususnya tentang bagaimana aturan yang berlaku dan spesifikasi teknis baku misalnya irigasi, jalan, telekomunikasi, kelistrikan, kesehatan, pengaruh timbal balik ke wilayah disekitarnya yang baik serta layak untuk diterapkan. Terkadang pengembang hanya membangun sekedar pemenuhan kebutuhan.

**b. Peranan Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika

pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantaranya infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Infrastruktur dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori antara lain :

- (1) Obyek rahasia : gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer, instansi polisi, BNN
- (2) Obyek vital : pusat & jaringan listrik, pusat & jaringan komunikasi, pusat perdagangan, pusat eksplorasi, pusat konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana & prasarana, transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.
- (3) Obyek umum : bangunan fasos & fasum (pendidikan, peribadatan, tempat hiburan, taman, jalur hijau dll) (“Reza Palepi”, 2015).

## **2. Bagian – Bagian Pembangunan Infrastruktur di Indonesia**

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terbagi jadi beberapa bagian yaitu transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Jika keempat bagian itu di bangun secara benar dan teratur maka Indonesia bisa bebas dari permasalahan pembangunan infrastruktur dan menjadi negara yang maju. Berikut penjelasan dari keempat bagian dari pembangunan di Indonesia.

### **a. Transportasi**

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan

gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah permukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Unsur – unsur transportasi meliputi :

- (1) Ada muatan yang diangkut
- (2) Tersedia jalanan yang dapat dilalui
- (3) Ada jalanan yang dapat dilalui
- (4) Ada terminal asal dan terminal tujuan.
- (5) Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat definisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah sedangkan : terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah (Santoso, 1996 : 1).

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran perusahaan angkutan yang bermacam macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan. Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan lainnya (Nasution, 2003 :16).

## **b. Telekomunikasi**

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan, dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya(“Reza Palepi”, 2015).

Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

## **c. Sanitasi**

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Pemerintah Indonesia harus bisa mengatasi masalah sanitasi ini. Apabila pemerintah tidak bisa mengatasi masalah sanitasi maka negara Indonesia akan memiliki kebudayaan hidup yang tidak sehat dan lingkungannya yang tidak sehat.

## **d. Energi**

Energi sangat memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia begitu juga dengan masyarakat di Indonesia.Indonesia sudah dipastikan memerlukan sumber energi yang besar untuk menghidupi negara ini.Untuk masalah ini pemerintah Indonesia juga harus mengambil tindakan untuk

mengatasi masalah energi ini. Mungkin di pikiran kita saat ini terlintas untuk menggunakan energi nuklir, seharusnya pemerintah Indonesia juga memikirkan energi alternatif lainnya. Wacana energi nuklir sudah sering diperbincangkan tetapi ada pro kontra terhadap energi nuklir ini.

## **G. *Konsep Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat***

### **1. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat***

Keadaan sosial ekonomi adalah pengaruh dari kegiatan pengelolaan sampah pada warga atau masyarakat maupun pemerintah, di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pada umumnya keberadaan Tempat Pelelangan Ikan menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif secara langsung, ada tenaga kerja yang tertampung, dampak negatif secara langsung keberadaan Tempat Pelelangan Ikan menimbulkan masalah sosial.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga menimbulkan peningkatan perekonomian bagi pengelola, pemerintah, maupun warga di sekitar TPI. Perubahan tingkat perekonomian karena adanya kegiatan pembangunan, kegiatan jual beli ikan yang memerlukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tersedia di sekitar Tempat Pelelangan Ikan.

Setiap masyarakat mempunyai ukuran tertentu untuk menghargai hal-hal tertentu yang ada dalam masyarakat tersebut. Masyarakat akan menghargai sesuatu lebih tinggi atau lebih rendah tergantung bagaimana masyarakat menilai sesuatu. Jika masyarakat lebih menghargai kekayaan

material dibandingkan lainnya, orang-orang yang mempunyai kekayaan banyak akan menempati posisi atau lapisan paling atas.

Gejala ini menyebabkan munculnya pelapisan dalam masyarakat yakni pembedaan posisi seseorang atau kelompok lain secara vertikal. Jadi, pelapisan sosial terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pelapisan masyarakat. Dasar ini bisa bersifat kumulatif. Artinya seseorang bisa saja memiliki beberapa dasar yang menyebabkan dia kedudukan dalam masyarakatnya semakin tinggi.

Dasar atau kriteria yang sering dijadikan untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Ukuran kekayaan. Orang yang secara ekonomi memiliki banyak kekayaan akan menempati posisi tinggi.
- b. Ukuran kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi tentunya akan menjadi lapisan tinggi pula.
- c. Ukuran kehormatan. Orang paling disegani biasanya tidak memandang kekayaan atau kekuasaan atau biasa disebut juga orang yang dituakan atau akan menempati lapisan paling atas.
- d. Ukuran ilmu pengetahuan. Orang dengan ilmu pengetahuan tinggi akan menempati posisi atau lapisan paling tinggi pula (“Anne Ahira”, 2015).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat kota dengan tiga pendekatan : 1) pendekatan produksi yaitu menggambarkan kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup, 2) pendekatan pendapatan menekankan pada penghasilan yang telah diterima oleh setiap rumah

tangga setiap bulannya, 3) pendekatan pengeluaran, menekankan besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. (Saleh, 2008 :15)

Dengan demikian dapat disimpulkan batasan mengenai kondisi sosial ekonomi berdasarkan yang dikemukakan di atas, bahwa yang dimaksud dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah keadaan kelompok atau individu mengenai tingkat kesejahteraan yang dapat diukur melalui :

- a. Tingkat pendapatan
- b. Tingkat pengeluaran dan menekankan pada pemerintahan kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, dan bahan bakar.
- c. Jenis dan ragam sumber pendapatan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan cukup beragam dan kompleks, terutama dalam kualitas lingkungan permukiman dan aspek kesehatan yang dihadapi, dan hal ini jelas berkaitan pula dengan dimensi ekonomi mereka, sebab ada keterkaitan secara langsung antara kemampuan pemenuhan kebutuhan dengan upaya-upaya perbaikan kualitas hidupnya. Pada masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang sangata tidak mencukupi cenderung hidup seadanya saja, hal ini ikut pula menggambarkan pada pola-pola pemukiman mereka yang kumuh, semrawut yang justru memiliki umpan balik pada derajat kesehatan. Sebagai lingkaran

kemiskinan yang sulit untuk diatasi lagi, apalagi ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat. (Pollano, 2008 :79)

## **2. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat**

Aspek sosial ekonomi masyarakat merupakan ukuran langsung tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Secara aplikatif maka hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar pada pokoknya dikelompokkan dalam empat kelompok kebutuhan, yaitu :

- a. Kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau keluarga misalnya sandang, pangan, dan papan.
- b. Kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan umum dan memperbaiki kemampuan individu untuk produksi dalam memenuhi kesejahteraannya. Misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, lembaga politik, sosial, dll.
- c. Kebutuhan untuk memperbaiki demi meningkatkan kesejahteraan, seperti sumberdaya, modal, kesempatan kerja dan pendapatan.
- d. Kebutuhan untuk memperoleh perasaan aman dan kebebasan untuk mengambil keputusan seperti hak asasi manusia, peran serta politik dan aturan hukum. (Ira Safitri D. 2002 : 4)

Selain itu, beberapa pengertian tentang konsep dasar manusia bahwa kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi masyarakat adalah rumah, pangan dan sandang sehingga dalam kehidupan manusia tidak hanya butuh makan akan tetapi memerlukan lain yaitu rumah dan pakaian. Oleh karena



itu kebutuhan dasar manusia dikelompokkan menjadi dua yaitu kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan perumahan serta kebutuhan sekunder. Kebutuhan manusia yang terakhir yakni kebutuhan manusia yang tidak mutlak harus dipenuhi lebih dahulu. Ini berarti bahwa setiap orang dapat saja tidak memenuhi kebutuhan sekundernya seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan hiburan. (Soeryatmadja, 1971 :1 )

Berdasarkan atas beberapa komponen kebutuhan dasar manusia tersebut, maka biro statistik pada tahun 1991 mengemukakan bahwa indikator kesejahteraan rakyat di Indonesia di hitung berdasarkan sepuluh komponen atau masalah pokok (Ananta, 1993 :192), yaitu :

- a. Kebutuhan menyekolahkan anak
- b. Keadaan perayaan hari raya
- c. Kemudahan menggunakan fasilitas transportasi
- d. Ketertiban dan keamanan
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Fasilitas tempat tinggal
- g. Pendapatan rumah tangga
- h. Keadaan tempat tinggal
- i. Pakaian anggota keluarga

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa ukuran kesejahteraan suatu masyarakat dapat dikelompokkan atas indikator yang bersifat material dan bersifat non material.

Kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya diidentifikasi atas beberapa hal pokok, yaitu kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan

pendidikan, kebutuhan untuk rekreasi serta kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan untuk berbelanja.

Salah satu penyebab utama terjadinya dekadensi sosial adalah terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan mereka, sehingga dalam kondisi tertentu menghalakan segala cara, seperti mencuri, merampok, menyerobot hak-hak orang lain yang ujung-ujungnya jelas menimbulkan masalah sosial yang dapat melibatkan banyak elemen di dalamnya.

Kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara deskriptif indikatornya sudah jelas namun indikatornya kualitatif dan kuantitatif sulit dirumuskan lebih-lebih dihubungkan di sini didasarkan atas pertimbangan nalar. Artinya, pelayanan sosial diperlukan jika kebutuhan minimal fisik dan psikologik belum terpenuhi, dengan rincian sebagai acuan :

- a. Sandang, yaitu kebutuhan untuk berpakaian
- b. Pangan, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum
- c. Perumahan, yaitu kebutuhan untuk melindungi diri dan beristirahat serta berinteraksi dengan keluarga
- d. Pendidikan, yaitu kebutuhan untuk membekali diri pada kecakapan, kecerdasan dan keterampilan
- e. Kesehatan, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan kondisi tubuh dan fisik.
- f. Psikologik, yaitu kebutuhan untuk memuaskan diri, mendapat penghargaan dan penghormatan dari lingkungan sosialnya.

### 3. Peran Serta Masyarakat

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Pemerintahan diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau Negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik dalam *intern* birokrasi maupun di luar birokrasi public/masyarakat.

Peran serta masyarakat, atau biasa dikenal juga dengan istilah partisipasi masyarakat, adalah berkenaan dengan keikutsertaan dalam satu atau beberapa bagian dari suatu siklus proses kegiatan pembangunan. Pembangunan tidak akan menjadi pembangunan yang nyata dan berkesinambungan jika tidak melibatkan partisipasi atau peran serta masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tindak-tanduk administratif yang mempunyai pengaruh langsung terhadap mereka. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran warga masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali berlangsung tidak efektif, kendala yang ada seringkali tidak mampu diantisipasi. Beberapa kendala tersebut sebagai berikut :

- a. Sikap sosial budaya seperti paternalistik, feudal, yang memandang pegawai pemerintah bukan sebagai abdi Negara tapi sebagai penguasa.
- b. Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis cenderung mementingkan kesadaran akan kelasnya saja, tetapi kurang menghargai kelas/kelompok lain.
- c. Adanya sikap ketergantungan dan pasrah kepada nasib.
- d. Kekecewaan yang mendalam pada masyarakat akibat adanya kesenjangan.
- e. Kemiskinan, sehingga waktu dan tenaga tercurah habis untuk mencari nafkah.
- f. Mobilisasi penduduk yang tinggi, terutama adanya urbanisasi.
- g. Program – program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

Bentuk peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan, berdasarkan karakteristik, kemampuan, kesempatan dan kondisi yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan :

- a. Peran serta pasif
  - Sadar/peduli kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah disembarang tempat.
  - Sadar akan kewajiban membayar retribusi.

b. Peran serta aktif

- Pengumpulan sampah dengan pola komunal
- Control sosial, dengan saling mengingatkan sesama anggota masyarakat.
- Ikut dalam kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan

Sebagai lingkungan hidup, kota merupakan hasil proses interaksi antara manusia dan lingkungannya. Untuk menjelaskan keterkaitan dari berbagai unsur lingkungan serta sebagai proses yang ada maka harus dikaji secara menyeluruh. Arti yang terkandung dalam keberlanjutan (*sustainable*) pada hakekatnya mengandung pengertian bahwa hendaknya upaya yang akan dicapai melalui pembangunan tidak melebihi kemampuan sumberdaya yang ada.

#### 4. Dampak Pembangunan Ekonomi

Dampak pembangunan ekonomi ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif sebagai berikut :

a. Dampak positif :

- (1) Peningkatan kegiatan ekonomi yang mendapatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pembangunan ekonomi mengurangi pengangguran.
- (2) Pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
- (3) Pembangunan ekonomi membawa perubahan pada struktur ekonomi dari agraris menuju industri.

- (4) Pembangunan ekonomi menciptakan pemerataan pendapatan kesempatan kerja, yang mengurangi kesenjangan antara golongan masyarakat kaya dan miskin.
- (5) Pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak negatif

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan yaitu polusi dan kerusakan lingkungan. Contohnya sebagai berikut :

- (1) Adanya pabrik menimbulkan polusi suara, polusi udara, dan polusi limbah yang mengganggu bagi penduduk
- (2) Lingkungan industri dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, sumber air tercemar, dan tanah pertanian rusak. Kerusakan ini sangat merugikan penduduk.

## **H. *Standar Pelayanan Minimum Prasarana***

### **1. Prasarana Jalan**

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1980 tentang jalan, jaringan jalan di dalam lingkup sistem kegiatan kota mempunyai peranan untuk mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya di dalam suatu hubungan hierarki (UU No.13 Tahun 1980, Pasal 2 Ayat 3).

#### **a. Jaringan Jalan Kolektor**

Karakter dari jaringan jalan kolektor adalah jalan yang berfungsi sebagai pengumpul lalu lintas dari jaringan local untuk disalurkan ke jaringan jalan arteri. Dengan kata lain jaringan jalan ini merupakan

penghubung jalan arteri dengan jalan local. Selain itu jalan yang memotong jaringan jalan ini sedapat mungkin dibatasi oleh kendaraan yang melintasinya. Jalan ini direkomendaasikan berkecepatan lebih rendah dari kecepatan kendaraan jalan arteri.

#### **b. Jaringan jalan lokal**

Jaringan jalan lokal adalah jalan yang berfungsi menampung lalu lintas dari jalan tertentu yang terlayani oleh jalan lingkungan, dan selanjutnya akan disalurkan ke jaringan jalan kolektor. Adapun karakter dari jalan lokal adalah jarak perjalanannya atau identik dengan panjang jalan ini relatif pendek dan jalan memotongnya (dapat saja berupa gank/lorong) tidak dibatasi. selain itu direkomendasikan lebih mudah dari ketentuan yang diberlakukan pada jaringan jalan kolektor maupun arteri.

Untuk hierarki jaringan jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada kecepatan kendaraan, lebar jalan dan garis sempadan jalan, yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1** Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

## Prasarana Jalan

No	Bidang Pelayanan	Indikator	Standar Pelayanan			Keterangan
			Kuantitas		Kualitas	
			Cakupan	Tingkat Pelayanan		
1	Jalan Kota	- Panjang jalan/jumlah penduduk - kecepatan rata-rata - luas jalan/kota	- panjang jalan 0,6 km/1.000 penduduk - ratio luas jalan 5% dari luas wilayah	kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam	- akses ke semua bagian kota dengan mudah	- untuk daerah yang prasarana transportasinya sebagian menggunakan angkutan sungai, dapat diperhitungkan secara tersendiri
2	Jalan Lingkungan	- Ratio panjang jalan dengan luas wilayah	- Panjang 40-60 m/Ha dengan lebar 2-5 m.			
3	Jalan Setapak	- ratio panjang jalan dengan luas wilayah	- panjang 50 – 110 m/Ha dengan lebar 8-2 m.			

Sumber : Standar Pelayanan Minimal KepMen No. 534/KPTS/M/2001



## 2. Prasarana Air Bersih

Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri. Pengertian air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Kriteria yang umum digunakan untuk menghitung kebutuhan jumlah pipa adalah :

- a. Pipa Primer 4-5 m/sambungan
- b. Pipa Sekunder 6-8 m/sambungan
- c. Pipa Tersier 9-12 m/sambungan

**Tabel 2.2** Standar Pelayanan Minimal Air Minum

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimum	
			Indikator	Nilai
1.	Air Minum	Clutser Pelayanan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%
		Sangat Buruk		
		Buruk		50%
		Sedang		70%
		Baik		80%
		Sangat Baik		100%

Sumber : Permen Pu No.14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel 2.3** Standar Pelayanan Air Bersih

Uraian	Satuan	Distribusi Setiap Jenis Kota			
		Kecil	Sedang	Besar	Metro
Kepadatan	Jiwa/Ha	100	200	300	400
Sisa Tekan Minimal di pel	m	8	8	10	10
Kebocoran air	%	20	20	20	20
Pelayanan domestik	%	90	85	80	70
Rasio pelayanan SL	%	90	90	90	90
Rasio Pelayanan HU/TA	%	10	10	10	10
Pelayanan Per SL	Jiwa/SL	5	5	6	6
Konsumsi SL	Ltr/jiwa	100	125	150	200
Pelayanan Per HU/TA	Jiwa/Hu	50	50	50	50
Konsumsi Hidrant Umum	Ltr/jiwa	30	30	30	30
Pelayanan Non Domestik	%	10	10	10	10
Konsumsi Non Domestik	Ltr/unit	2000	2000	2000	2000
Kemiringan Lahan	-	Datar	Datar	Datar	Datar

Sumber : Standar Nasional Indonesia Tahun 2004

Air bersih memegang peranan penting sebagai kebutuhan pokok dan utama penghidupan dan kehidupan penduduk di kawasan perencanaan. Beberapa sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh penduduk kawasan perencanaan bersumber dari air permukaan (sungai) dan dari mata air pegunungan yang dikelola oleh PDAM dan masyarakat.

### 3. Prasarana Listrik

Sistem distribusi Prasarana kabel listrik dengan menggunakan tiang yang terbuat dari pipa beton yang penempatannya pada jalan dengan jarak satu dengan yang lainnya adalah lebih kurang 50 meter dan di beberapa tempat ditempatkan gardu listrik yang sekaligus berfungsi sebagai pengontrol gangguan listrik yang akan terjadi.

**Tabel 2.4** Kebutuhan Jaringan Listrik

No.	Jenis Sambungan	Jumlah Pelanggan (Unit)	Daya (KVA)	Jumlah (KVA/Watt)
1	Rumah Type A	199	1,300	258,414
2	Rumah Type B	596	900	536,706
3	Rumah Type C	1,193	450	536,706
4	Pendidikan	4	1,500	6,000
5	Peribadatan	20	1,500	30,000
6	Kesehatan	8	1,500	12,000
7	Pelayanan Umum	4	1,500	6,000
8	Perdagangan	4	1,500	6,000
9	Olah Raga	3	1,500	4,500
10	Penerangan Lampu Jalan = 10 % dari total kebutuhan	—	—	139,633
J u m l a h		2,031		1,535,959

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2002

**Tabel 2.5** Kebutuhan Listrik Untuk Perumahan

Jenis rumah	Ukuran Petak rata-rata (m <sup>2</sup> )	Luas bangunan rata-rata (m <sup>2</sup> )	Kebutuhan (watt)	Jumlah rumah yang dilayani gardu (unit)
Kecil	100	70	900	1400
Sedang	200	240	900	420
Besar	400	600	1300	100

Sumber : Standar Nasional Indonesia Tahun 2004

Keseluruhan kebutuhan energi listrik di kawasan perencanaan berdasarkan standar perencanaan lingkungan perkotaan kebutuhan listrik adalah pada tabel 2.6 di bawah ini :

**Tabel 2.6** Standar Pelayanan Minimal Jaringan Listrik

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan Kualitas	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Permukiman	Type besar membutuhkan energi listrik sebesar 1.300 watt/unit Type kecil dan sedang membutuhkan energi listrik sebesar 900 watt/unit	Energi listrik sebesar 900 watt/unit
2.	Bangunan Sosial	Membutuhkan 50% dari kebutuhan permukiman	50% dari kebutuhan permukiman
3.	Bangunan Ekonomi	Membutuhkan 25% dari kebutuhan permukiman	25% dari kebutuhan permukiman
4.	Penerangan Jalan	Membutuhkan 10 % dari kebutuhan permukiman	10 % dari kebutuhan permukiman
5.	Kehilangan energi	Diperkirakan 30 % dari total energi listrik yang dibutuhkan	

*Sumber : Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum*

#### 4. Prasarana Sampah

Sampah mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya, tergantung dari sumber, tingkat sosial ekonomi penduduk dan iklim (Suryanto, 1988).

Untuk untuk mengkuantitaskan jumlah sampah yang dihasilkan sangat sulit maka digunakan standar umum yakni 2,9 liter/orang/hari. Sedangkan untuk fasilitas perdagangan 10% dari jumlah timbunan sampah rumah tangga, dan untuk pendidikan yaitu 1,15 liter perhari untuk tiap siswa, perkantoran yaitu 10% dari jumlah timbunan sampah pendidikan serta untuk sampah jalan yaitu  $0,825 \times \text{panjang jalan}$ .

Kuantitas sampah yang dihasilkan dikumpulkan ataupun dikelola dengan menggunakan sarana dan prasarana, berupa penyediaan;

- a. Gerobak 1 M<sup>2</sup> untuk 200 KK.
- b. Tempat pembuangan sementara (TPS) untuk 150 KK.
- c. Kontainer sampah dengan volume 6 – 8 M<sup>2</sup> 2.000 KK.

**Tabel 2.7** Sistem Penanganan Persampahan

No.	Jenis Fasilitas Persampahan	Kebutuhan		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Standar Kebutuhan	Keterangan
		Min	Max			
1.	Produksi Sampah	19,878	29,817	9,939	2	ltr/org/hr
2.	Gerobak Sampah	15	25		1	1 Unit = 1 m <sup>3</sup>
3.	Kontainer	3	6		1	1 Unit = 3 m <sup>3</sup>
4.	Truk Sampah	1	2		3	1 Unit = 1 : 3 kontainer

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2002

**Tabel 2.8** Standar Pelayanan Minimal Jaringan Persampahan

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan Kualitas	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Rumah Tangga	timbulan sampah perorang yaitu 2,9 liter/hari atau 11,6 liter/KK,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 unit tong sampah melayani 40liter/150KK</li> <li>• 1 unit gerobak sampah melayani 1000liter/200 KK</li> <li>• 1 unit kontainer melayani 8000liter/1000KK</li> </ul>
2.	Pendidikan	timbulan sampah yaitu 1,15 liter/hari/siswa	
3.	Perdagangan	30% dari jumlah timbulan sampah rumah tangga	
4.	Perkantoran	10% dari jumlah timbulan sampah rumah tangga	

Sumber : Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian *kualitatif-kuantitatif* atau dikenal dengan metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 2011 : 404).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sequential exploratory* , yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode kualitatif, yaitu pada tahap pertama akan diisi dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif, kemudian pengumpulan dan menganalisis data kuantitatif.

##### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi Penelitian difokuskan pada Kelurahan Benteng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) untuk mengetahui tingkat pembangunan dan kondisi sosial

ekonomi masyarakat sekitar dengan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge.

### ***C. Waktu Penelitian***

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian dimulai dengan melakukan usaha penelitian, kegiatan survey lapangan, pembuatan proposal, kegiatan penelitian, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu dimulai dari bulan September sampai bulan November Tahun 2015.

### ***D. Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau universal obyek yang ciri-cirinya atau karakteristik-karakteristiknya dapat diamati untuk dapat ditarik menjadi sampel atau obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bentenge yaitu sebanyak 4.859 jiwa.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah jumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi yaitu masyarakat di Kelurahan Bentenge. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu (Arif Tiro, 3: 1999). Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

penarikan sampel *probability sampling* yang merupakan teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang digunakan pada teknik penarikan sampel *probability sampling* adalah *simple random sampling* (sampel acak) yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, dengan mengambil anggota sampel dari populasi tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dilakukan jika populasinya homogen.

Berdasarkan perhitungan dengan batas kesalahan untuk penelitian sebesar 10%, maka besarnya sampel ditentukan dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang digunakan

N = Jumlah populasi

e = Derajat kebebasan

Dengan demikian jumlah populasi N untuk pada penelitian ini yaitu sebanyak 4.859 jiwa dengan presisi yang ditetapkan 10 % adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{4859}{1 + (4859 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{4}{4,5} = 100 \text{ orang}$$

Jadi, jumlah sampel untuk masyarakat adalah sebanyak 100 orang responden.



### ***E. Subyek Penelitian***

Subyek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun subyek pada penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat yang telah lama bermukim di Kelurahan Bentengnge dan dianggap mengetahui lebih rinci mengenai Kelurahan Bentengnge.
2. Masyarakat yang mempunyai waktu luang untuk melakukan wawancara.
3. Tokoh masyarakat Kelurahan Bentengnge

### ***F. Jenis dan Sumber Data***

Jenis data yang diperoleh dapat digolongkan dalam dua jenis :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, melalui observasi lapangan, kuesioner di lapangan, yang berhubungan langsung dengan dampak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dalam hal ini yaitu terhadap pembangunan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis dan sumber data, kegiatan serta informasi lain yang erat kaitannya dengan objek penelitian, seperti kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik berupa data fisik dasar

lokasi penelitian, karakteristik kependudukan serta jumlah produksi perikanan yang dihasilkan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

### ***G. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan pada penelitian ini yaitu observasi lapangan, wawancara, kuesioner dan metode telaah pustaka. Penerapan teknik – teknik tadi tergantung pada kebutuhan data yang harus dikumpulkan.

#### **1. Observasi lapangan**

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari instansi terkait dengan data yang sebenarnya di lapangan. Observasi lapangan yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Benteng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

#### **2. Kuesioner**

Kuesioner adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui daftar pertanyaan untuk di isi. Cara ini mengacu pada pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden dan jawaban yang diperoleh dalam bentuk tertulis, dengan memakai alat bantu kuesioner.

#### **3. Survey instansi**

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dan melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan data kualitatif baik dalam

bentuk data statistik maupun dalam bentuk peta yang dikumpulkan dari berbagai dinas dan instansi seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum serta BAPPEDA atau Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bulukumba.

#### **4. Wawancara**

Dengan melakukan wawancara langsung yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui wawancara langsung kepada masyarakat pada lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

#### ***H. Variabel Penelitian***

Variabel dapat diartikan sebagai ciri dari individu objek, gejala yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel yang akan digunakan. Adapun variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1** Variabel dan Indikator Penilaian Dampak TPI Bentengnge Terhadap  
Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
1.	Aspek Pembangunan Infrastruktur	Jalan	- Panjang dan lebar jalan - Lapisan jalan
		Penyediaan air bersih	- Layanan pipa PDAM - Kualitas air bersih - Komunitas air bersih
		Penyediaan listrik	- Layanan listrik per rumah - Komunitas listrik
		Pengelolaan Sampah	- Kontainer sampah - Pengangkutan sampah
2.	Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat	Tingkat pendidikan	- Tamat tingkat Universitas - Tamat hingga SMA - Tidak Sekolah
		Tingkat pendapatan	- Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 - Rp. 500.000 – Rp.1.000.000 - <Rp. 500.000
		Sumber mata pencaharian	- Tersedia - Tersedia tapi tidak maksimal - Tidak tersedia
		Tingkat kesehatan	- Berobat ke RS/Dokter - Berobat ke Puskesmas - Pengobatan Tradisional

Sumber : Hasil Hipotesa

## ***I. Metode Analisis Data***

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Analisis Kualitatif**

Analisis yang digunakan dengan metode pendekatan yang bersifat kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai dampak dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge.

Pada umumnya penelitian kualitatif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.

### **2. Analisis Pembobotan**

Analisis pembobotan merupakan pemberian bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria dampak dari keberadaan TPI Bentengnge. Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan mengukur tiap indikator dengan menggunakan skala Likert. Adapun pemberian bobot ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge terhadap pembangunan Infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Adapun kriteria metode untuk mengetahui dampak dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

Standar skoring yang digunakan adalah :

- Skor 5 untuk Sangat Positif
- Skor 3 untuk Positif
- Skor 1 untuk Negatif

Adapun kriteria untuk penentuan nilai skoring masing-masing dari pernyataan responden digunakan pedoman sebagai berikut :

*a. Indikator Jalan*

Sasaran pembobotan ketersediaan, kondisi, dan pemanfaatan jalan adalah berdasarkan Norma Pedoman Prosedur Manual tentang Jalan.

- 1) Panjang dan lebar jalan sesuai dengan klasifikasinya, diukur dengan kategori :
  - a) Skor 5 apabila 70% - 100% sesuai dengan standar panjang jalan
  - b) Skor 3 apabila 40% – 69,99% sesuai dengan standar panjang jalan
  - c) Skor 1 apabila 0% - 39,99% tidak sesuai dengan standar panjang jalan
- 2) Lapisan permukaan jalan, diukur dengan kategori
  - a) Skor 5 apabila permukaan jalan diperkeras dengan aspal mencapai 70% - 100%.
  - b) Skor 3 apabila permukaan jalan diperkeras dengan aspal dikisaran 40% - 69,99%.

- c) Skor 1 apabila permukaan jalan diperkeras dengan aspal 0% - 39,99%.

*b. Indikator Ketersediaan Air Bersih*

Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan kondisi jumlah rumah penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh aliran air dari sistem penyediaan air bersih berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual tentang Air Bersih

- 1) Layanan pipa PDAM per unit rumah
  - a) Skor 5 jika 70% - 100% KK terlayani pipa PDAM dari total KK di Kelurahan Bentengnge.
  - b) Skor 3 jika terlayani pipa PDAM di kisaran 40% – 69,99%.
  - c) Skor 1 jika 0% - 39,99% terlayani pipa PDAM dari total KK di Kelurahan Bentengnge.
- 2) Kualitas air bersih
  - a) Skor 5 jika 70% - 100% sampel menyatakan kualitas air bersih baik (tidak berubah warna, rasa dan bau).
  - b) Skor 3 jika 40 – 69,99% sampel menyatakan kualitas air bersih bersih baik (tidak berubah warna, rasa dan bau).
  - c) Skor 1 jika 0% - 39,99% sampel menyatakan kualitas air bersih bersih baik (tidak berubah warna, rasa dan bau).
- 3) Kontinuitas air bersih
  - a) Skor 5 jika lama air mengalir 24 jam per hari.
  - b) Skor 3 jika lama air mengalir 12 jam perhari.

- c) Skor 1 jika lama air 0 jam per hari atau tidak mengalir.

c. *Indikator Ketersediaan Listrik*

Pembobotan ketersediaan listrik dilakukan berdasarkan kondisi jumlah rumah penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh aliran listrik dari sistem penyediaan listrik berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual tentang Listrik.

1) Layanan Listrik per unit rumah

- a) Skor 5 jika 70% - 100% KK terlayani listrik dari total KK di Kelurahan Bentengnge.
- b) Skor 3 jika terlayani listrik di kisaran 40% – 69,99%.
- c) Skor 1 jika 0% - 39,99% terlayani listrik dari total KK di Kelurahan Bentengnge.

2) Komunitas Listrik

- a) Skor 5 jika lama lampu menyala 24 jam perhari.
- b) Skor 3 jika lama lampu menyala 12 jam perhari.
- c) Skor 1 jika lama lampu menyala 0 jam perhari.

d) *Indikator Pengelolaan Sampah*

Metode pembobotan prasarana persampahan berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual tentang Persampahan adalah sebagai berikut :

1) Kontainer Sampah

- a) Skor 5 jika terdapat 70% - 100% pelayanan kontainer sampah dari total KK di Kelurahan Bentengnge.



- b) Skor 3 jika terdapat 40 – 69,99% pelayanan kontainer sampah dari total KK di Kelurahan Bentengnge.
    - c) Skor 1 jika terdapat 0% - 39,99% pelayanan kontainer sampah dari total KK di Kelurahan Bentengnge.
  - 2) Pengangkutan Sampah
    - a) Skor 5 jika tersedia kontainer dan diangkut secara rutin.
    - b) Skor 3 jika tersedia kontainer tapi tidak diangkut.
    - c) Skor 1 jika tidak tersedia container.
- e) *IndikatorTingkat Pendapatan Masyarakat*
  - a) Skor 5 apabila jumlah pendapatan masyarakat Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.00,- setiap bulan.
  - b) Skor 3 apabila jumlah pendapatan masyarakat Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- setiap bulan.
  - c) Skor 1 apabila jumlah pendapatan masyarakat <Rp.500.000,- setiap bulan.
- f) *Indikator Sumber Mata Pencaharian*
  - 1) Skor 5 apabila tersedia lapangan pekerjaan.
  - 2) Skor 3 apabila tersedia lapangan pekerjaan tapi tidak maksimal.
  - 3) Skor 1 apabila tidak tersedia lapangan pekerjaan.
- g) *Indikator Tingkat Pendidikan Masyarakat*
  - 1) Skor 5 apabila banyak masyarakat yang melanjutkan hingga perguruan tinggi.
  - 2) Skor 3 apabila masyarakat tamat SMA.

3) Skor 1 apabila banyak masyarakat tidak sekolah.

h) *Indikator Tingkat Kesehatan Masyarakat*

a) Skor 5 apabila masyarakat berobat ke Rumah Sakit.

b) Skor 3 apabila masyarakat berobat ke Puskesmas.

c) Skor 1 apabila masyarakat berobat dengan pengobatan tradisional.

Selanjutnya untuk menentukan nilai dari setiap komponen dilakukan klasifikasi jenis penilaian dengan menggunakan Skala Likert I/3 yaitu :

**Tabel 3.2** Penentuan Kategorisasi dengan Skala Likert

No.	Skala Likert	Interval	Persentase (%)	Nilai Bobot
1.	Sangat Positif	6,7 – 10	66,7 – 100	5
2.	Positif	3,4 – 6,6	33,4 – 66,6	3
4.	Negatif	0 – 3,3	0 - 33,33	1

Adapun metode perhitungan hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yaitu :

$$T \times P_n$$

Di mana : T = jumlah responden yang memilih

$P_n$  = pilihan angka skor

Kemudian untuk mendapatkan hasil interpretasi terlebih dahulu harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah responden}$$

$$X = \text{skor terendah} \times \text{jumlah responden}$$

Kemudian setelah mengetahui hasil dari masing-masing pernyataan dari kuesioner, maka untuk mengetahui dampak dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka digunakan rumus index sebagai berikut :

$$\text{Rumus Index (\%)} = \frac{x - s}{y} \times 100$$

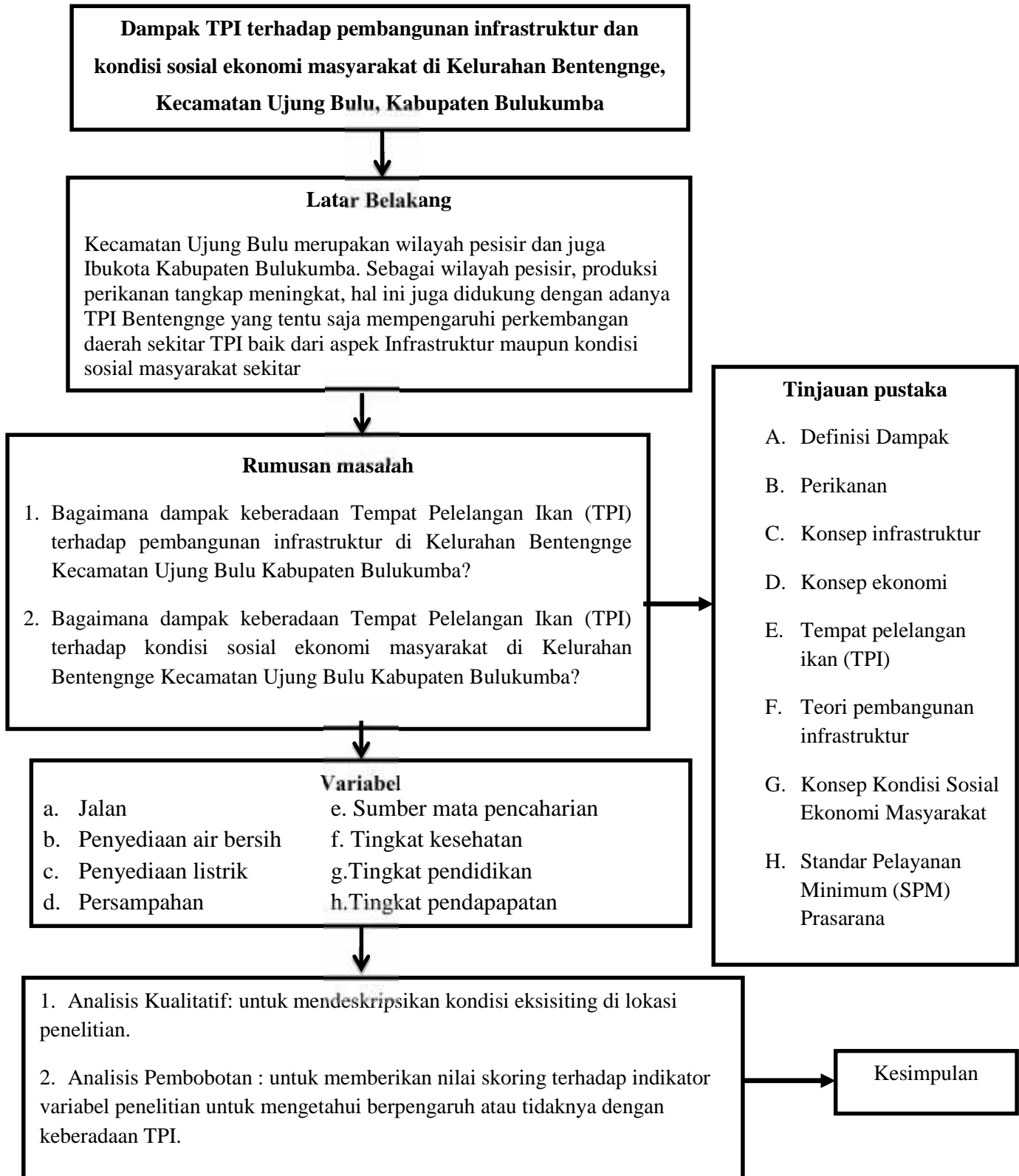
#### *J. Defenisi Operasional*

1. **Dampak**, benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif.
2. **Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**, pusat kegiatan pelabuhan ikan di darat, yaitu tempat melelang ikan hasil tangkapan dan menjadi tempat pertemuan antar penjual (nelayan atau pemodal) dengan pembeli (konsumen, pedagang atau agen pabrik pengolahan ikan). Dalam penelitian ini yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentengnge.
3. **Infrastruktur**, merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi (Grigg, 1988). Infrastruktur dalam penelitian ini yaitu jalan, air bersih, listrik dan persampahan.
4. **Sosial Ekonomi**, merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Aspek sosial ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mata pencaharian, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat.

**5. Skala Likert**, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui dampak dari TPI Bentengnge, dalam hal ini digunakan Skala Likert I/3 dengan kategorisasi Sangat positif, positif dan negatif. Adapun maksud dari kategorisasi skala likert yaitu :

- a. Sangat Positif**, keberadaan TPI Bentengnge membawa perubahan besar dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang meningkat serta kondisi sosial ekonomi juga meningkat yang dapat dilihat dari meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.
- b. Positif**, keberadaan TPI Bentengnge membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi masyarakat atau peningkatan pembangunan infrastruktur akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan dikembangkan.
- c. Negatif**, keberadaan TPI Bentengnge tidak membawa keuntungan baik untuk wilayah Kelurahan Bentengnge maupun masyarakat di Kelurahan Bentengnge, karena dengan keberadaan TPI Bentengnge dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

### K. Kerangka Pikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge membawa dampak **positif** dalam peningkatan pembangunan infrastruktur terutama pada infrastruktur air bersih dengan nilai skoring 5 dan dikategorikan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdampak **positif** terhadap tingkat penyediaan air bersih.
2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge membawa dampak **positif** dalam peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Bentengnge terutama pada aspek tingkat pendapatan masyarakat dengan nilai skoring 5 yang dikategorikan **positif**. Hal ini dikarenakan munculnya lapangan pekerjaan yang dapat menunjang tingkat pendapatan masyarakat. Dengan ekonomi yang memadai tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa, dengan ekonomi yang baik maka masyarakat mampu membiayai biaya pendidikan anak-anak mereka serta mampu untuk membiayai pengobatan keluarga mereka apabila ada yang sakit.

Meskipun demikian tetap saja masih ada yang perlu dibenahi yaitu ketersediaan pekerjaan yang belum merata. Meskipun dengan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengnge mendatangkan sumber mata pencaharian baru akan tetapi masih ada warga yang belum bekerja. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan masyarakat di Kelurahan Bentengnge.

## **B. Saran**

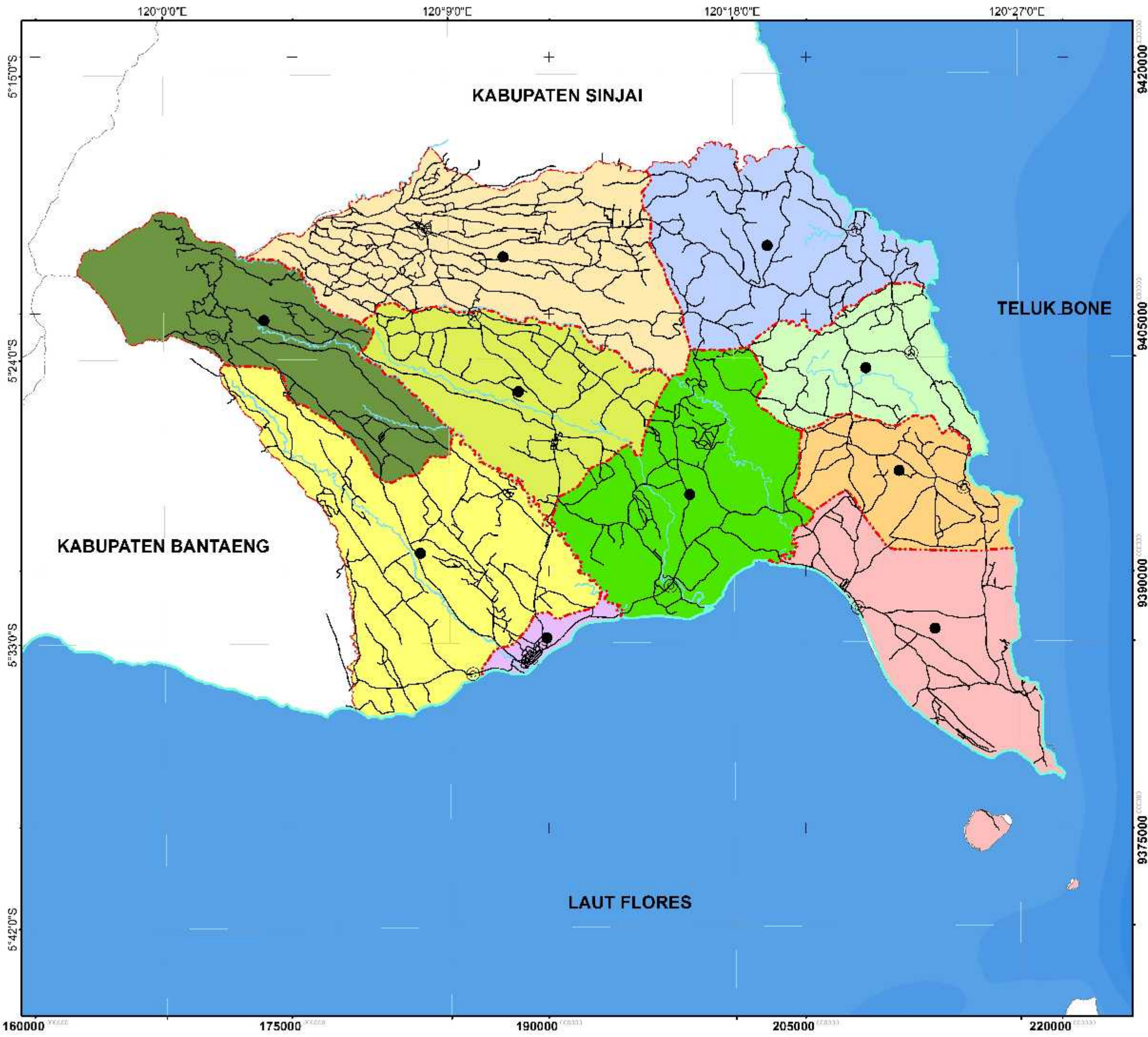
Mengacu pada hasil pembahasan serta kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal mengenai dampak keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap pembangunan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Bentengnge sebagai berikut :


1. Perlu memperhatikan pengelolaan sampah. Perlu pengadaan kontainer dan motor angkut sampah yang mengangkut sampah secara rutin sehingga sampah tidak bertumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dibutuhkan. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara masih ada beberapa masyarakat yang membuang sampah ke laut. Partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan tentu saja akan mendukung segala kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
3. Perlunya dilakukan pelatihan sumber daya manusia agar masyarakat yang belum bekerja bisa segera mendapatkan pekerjaan. Karena meskipun dengan

keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Bentengge mendatangkan lapangan pekerjaan, tapi jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik maka tidak akan berdampak apa-apa.

4. Perlunya peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengangkat topik mengenai wilayah pesisir mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dengan sumber daya alam laut yang melimpah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut agar segala sumber daya alam baik di darat maupun dilautan dapat dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.







Institut Pendidikan Wilayah dan Kota  
Sekeloa Bala dan Teknik-03  
UIN Alauddin Makassar  
2015

---


Peta Administrasi  
Kabupaten Bulukumba

---

Judul Penelitian

Dampak TPA Terhadap Pembangunan  
Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  
Di Kecamatan Sontaga Kecamatan Ujung Dala Kabupaten Bulukumba

---




U  
1:210.000  
0 2.25 4.5 3 3.5 Km

Proyeksi: Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Sektoral dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal: WGS 1984  
Datum Vertikal: Mula Lantai Esmerald  
Sistem Tinggi: Meori  
Satuan: Meter

---

Daftar Letak



Kab. Bulukumba

---

**Legenda**

<p><b>ADMINISTRASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ibu Kota Kota</li> <li> Batas Kabupaten</li> <li> Batas Kecamatan</li> <li> Garis Pantai</li> <li> Jembatan</li> <li> Jalan</li> </ul> <p><b>HYDROGRAFI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Sungai</li> <li> Laut</li> </ul>	<p><b>KECAMATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Kab. Sembawa</li> <li> Kab. Dompu</li> <li> Kab. Bulukumba</li> <li> Kab. Bantaeng</li> <li> Kab. Selayar</li> <li> Kab. Kayang</li> <li> Kab. Gowa</li> <li> Kab. Tana Toraja</li> <li> Kab. Ujung Pandang</li> <li> Kab. Ujung Loe</li> </ul>
---	---

---

Disusun Oleh:

1) Dwi A. H. Mislal, S.Pd, M.T  
2) Nur Syahr AS, ST, M.Si

---

Mahasiswa:

Willa Dwi Astuti  
3080011074

---

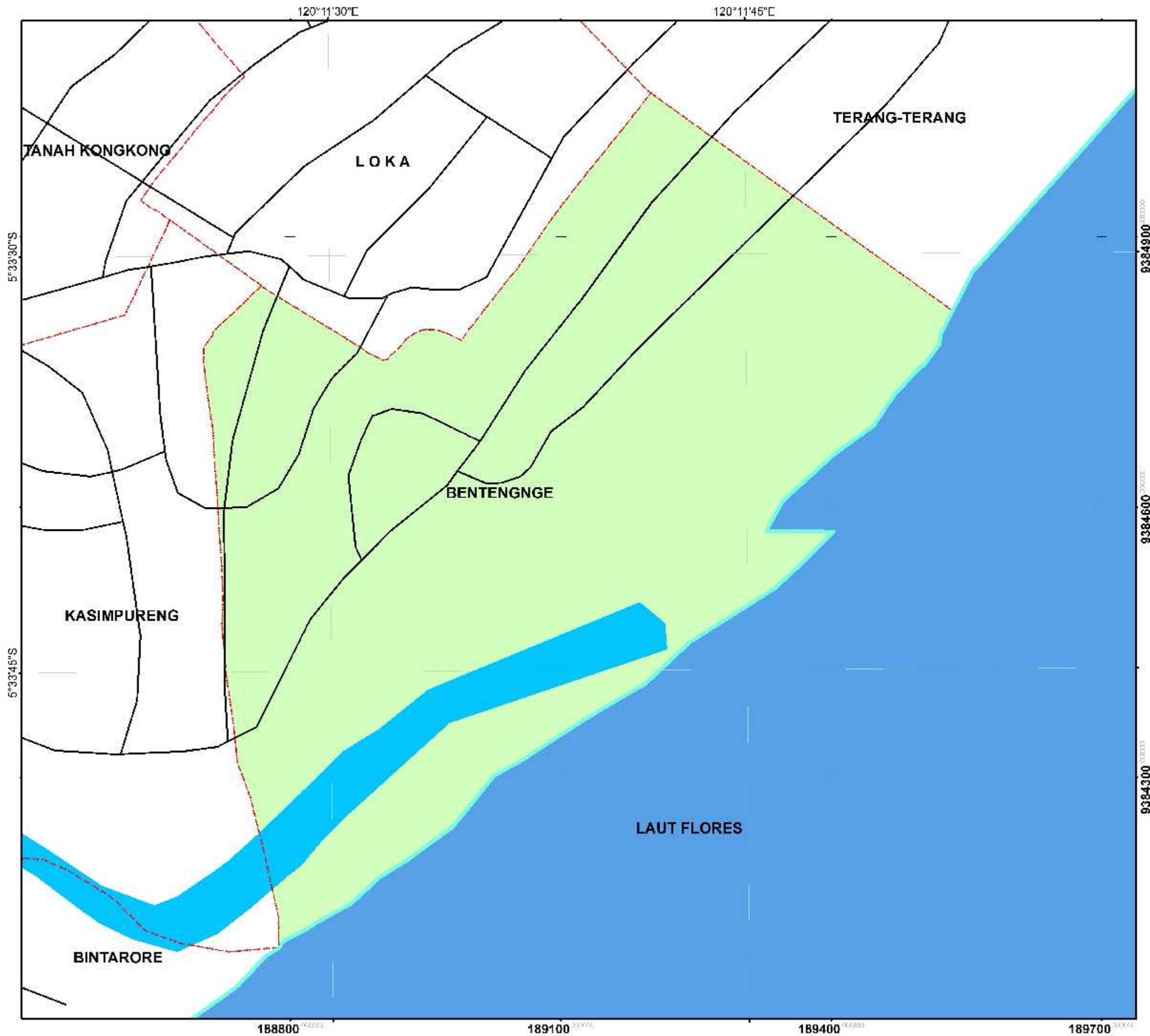
**Sumber Peta:**

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 B-10, tahun 2010
- Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Kabupaten Bulukumba tahun 2010









Institut Pendidikan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar  
2015

Peta Administrasi  
Kelurahan Bentengnge

Judul Penelitian

Dampak TPI Terhadap Pembangunan  
Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  
Di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulo Kabupaten Bulukumba

U

1:4.000

0 0,0425 0,085 0,17 0,255 Km

Proyeksi: Transverse Mercator  
Datum: WGS 1984  
Datum Horizontal: WGS 1984  
Datum Vertikal: Mula dari Sea Level  
Sistem Tinggi: Meter  
Satuan Raster: Meter

Daftar Lokasi



Kelurahan Bentengnge

#### Legenda

##### ADMINISTRASI

- Kantor Camat
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan

##### TOPOGRAFI

- Sungai
- Laut

##### KETERANGAN

- Kawasan Berlembaga
- Kawasan Kiblat
- Kawasan Cade
- Kawasan Cade
- Kawasan Kiblat
- Kawasan Kiblat
- Kawasan Kiblat
- Kawasan Kiblat
- Kawasan Kiblat
- Kawasan Kiblat

Dosen Pembimbing

1) Dr. H. H. Miftah, S.Pd, M.T  
2) Nur Syarif, S.T, M.Si

Mahasiswa

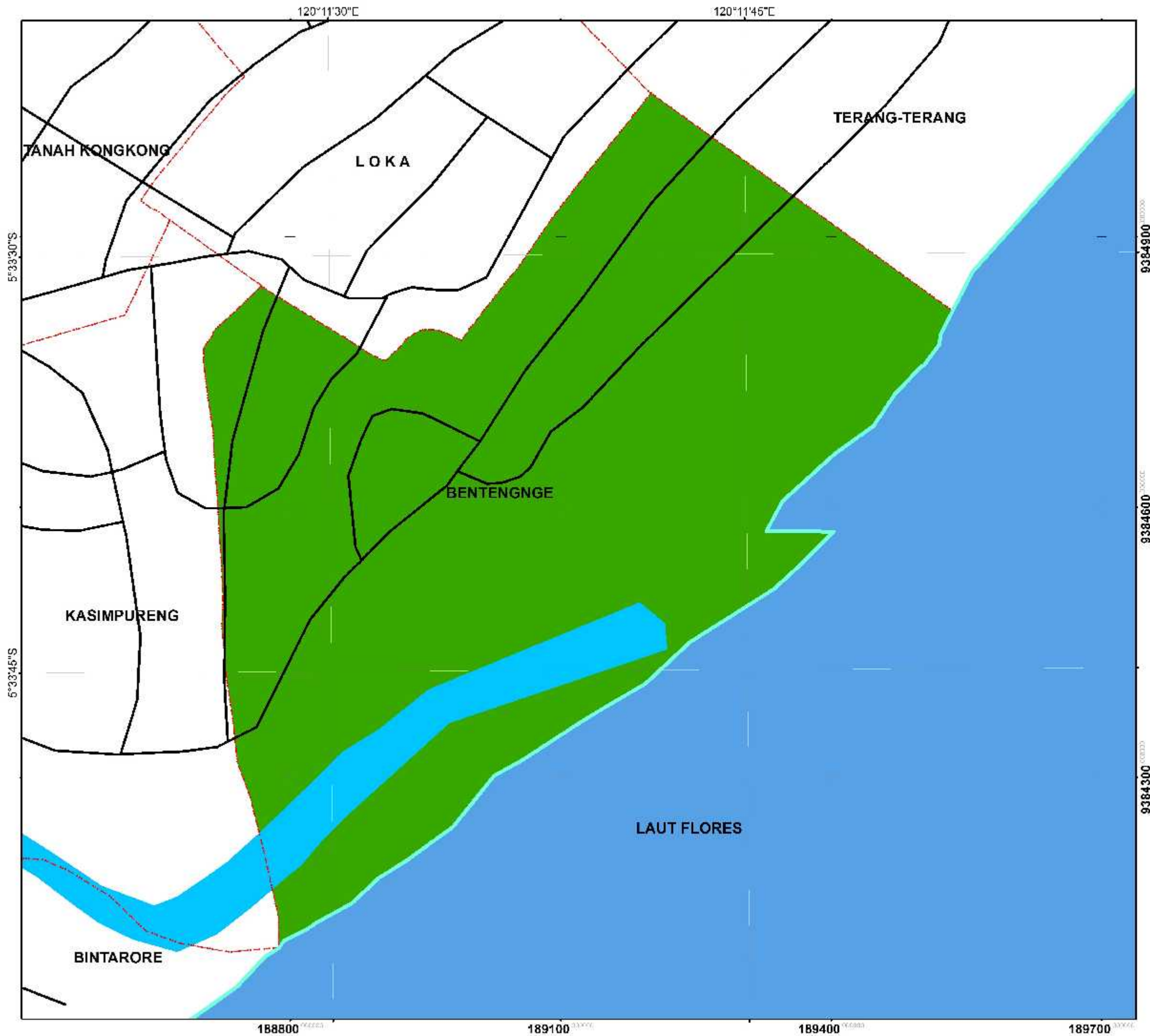
Villa Dwi Astuti  
3080011074


Sumber Peta

- Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010  
- Peta Administrasi RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2010  
- Peta Administrasi Kecamatan Ujung Bulo Tahun 2010









Institut Pendidikan Wilayah dan Kota  
Fakultas Belia dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar  
2015

---


Peta Topografi  
Kelurahan Bentengnge

---

Judul Penelitian

Desain TPI Terhadap Pembangunan  
Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  
Di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

---



U

1:4.000


0 0,0425 0,085 0,17 0,205

Km

Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Sengon dan Grid Universal Transverse Mercator
Dalam Horizontal	WGS 1984
Dalam Vertikal	Muka Laut Setempat
Salah Sisi	Meter

---

Diagram Lokasi



Kelurahan Bentengnge

---

**Legenda**

**ADMINISTRASI**

- Kotlint Camat
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan

**TOPOGRAFI**

- Sungai
- Laut

**KET. LAHAN**

- 0 - 20 m

---

Disen Perancang

1) Dr. Ir. H. Mialah, S.P., M.T.  
2) Nur Danni A.S., S.T., M.Si

---

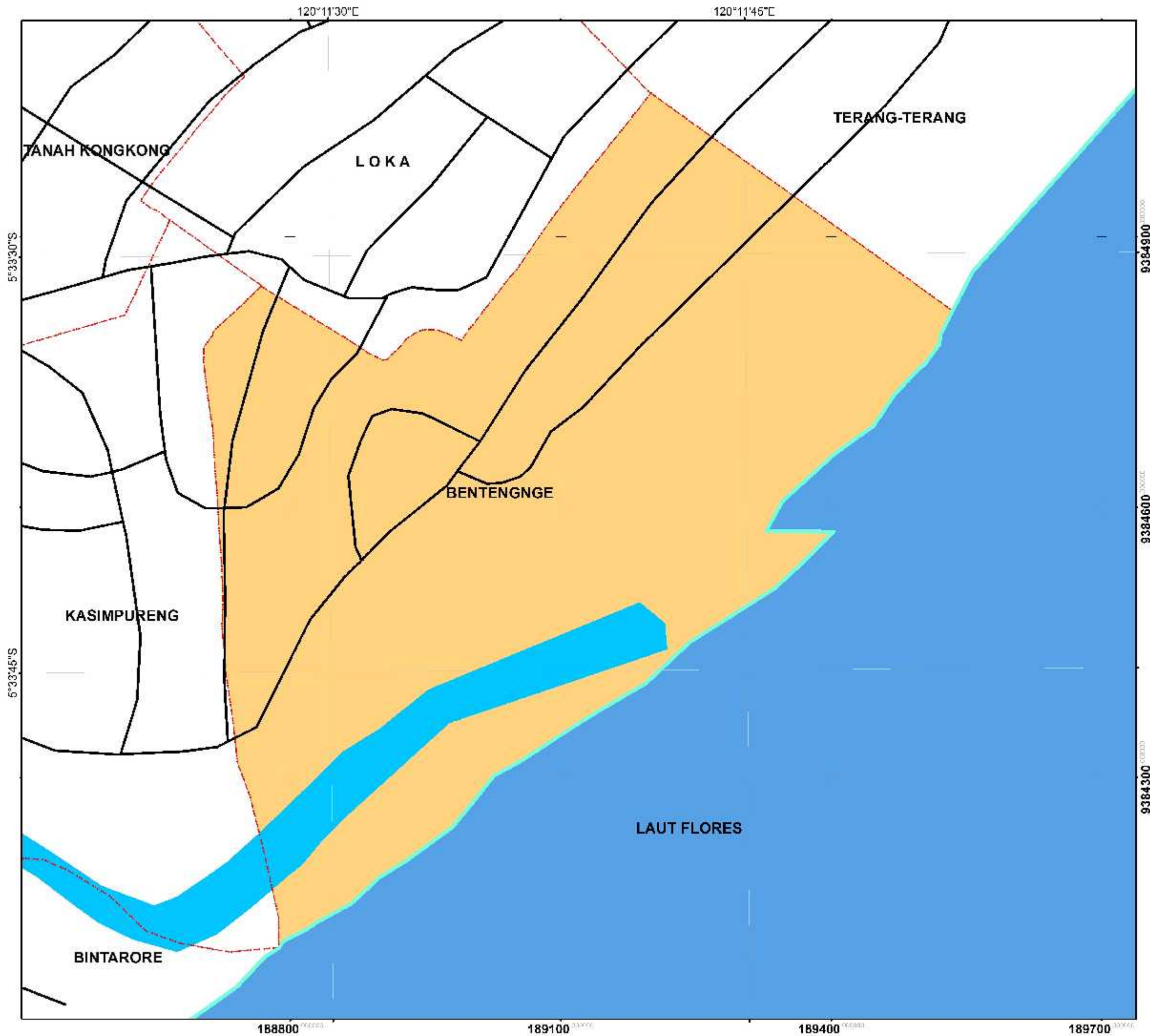
Mahasiswa :

Villy Dwi Astuti  
30800111274

---

Sumber Peta :

- Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
- Peta Administrasi Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2010



Institut Pendidikan Wilayah dan Kota  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar  
2015

Paul George  
Keluaran Berlembang

## Jurnal Penelitian

Dampak TPI Terhadap Pembangunan  
Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  
Di Kelurahan Bantarjaya Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Sukatiraja



1:4.50

Prinsipal	.....	Transverse Mercator
Sistem Grid	.....	Grid, Geographic dan Grid Universal Transverse Mercator
Teknik Hec. Azimut	.....	WGS 1984
Dalam Vertikal	.....	Muka Laut Samudra
Solusi Tinggi	.....	Metode
Solusi Kemiringan	.....	Metode

Diagram Lokasi



- **Kulturellen Bedürfnisse**

### Legenda

## SYNOPSIS

- Kantor Camat
- == Delas Kedarnasari
- == Delas Kelurahan
- == Jalan

7076

- Summary**

## K-1. HAHN

- Brexit, Liefer, Tja da E da en Allianz**

Dosen Pembimbing:

2) Nur Syarif AS, ST, M Si

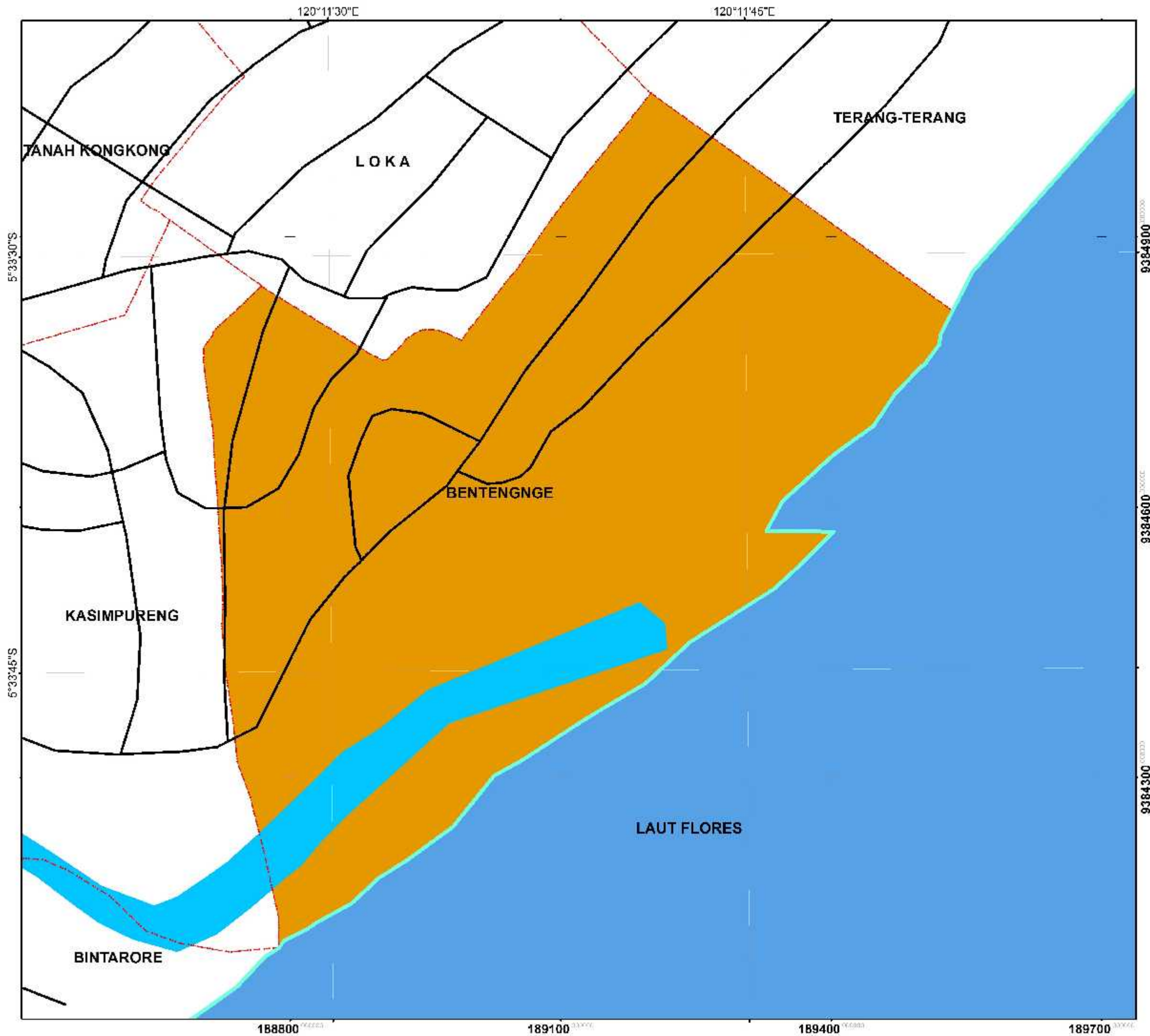
### Mathematics:


Villa Del Astill  
3080011071

Sl. Tbr. Peta :

- Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
- Peta Administrasi Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2010







Institut Pendidikan Wilayah dan Kota  
Fakultas Belia dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar  
2015

---

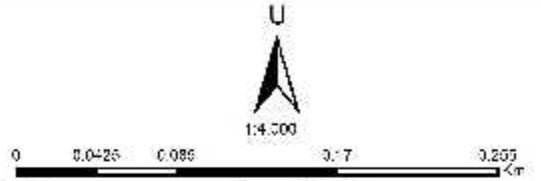
Data Jenis Tanah  
Kelurahan Bentengnge

---

Judul Penelitian

Dampak TPI Terhadap Pembangunan  
Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  
Di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulo Kabupaten Bulukumba

---




0 0.0425 0.085 0.17 0.200 Km

---

Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Sengatan Grid Universal Transverse Mercator
Dalam Horizontal	WGS 1984
Dalam Vertikal	Muka Laut Setempat
Salah Sisi	Meter

---

Diagram Lokasi



Kelurahan Bentengnge

---

**Legenda**

**ADMINISTRASI**

- Kotlinto Camat
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan

**TOPOGRAFI**

- Sungai
- Laut

**KEL. BENTENGNGE**

- Alas

---

Disenai Perancang

1) Dr. Ir. H. Mialah, S.P., M.T.  
2) Nur Dwi Astuti, S.T., M.Si

---

Mahasiswa

Villa Dwi Astuti  
30800111271

---

Sumber Peta :

- Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
- Peta Administrasi Kecamatan Ujung Bulo Tahun 2010

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. “ *Pengaruh Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi Masyarakat* “. <http://uwityangyoyo.wordpress.com/2015/06/10/>( 28 September 2015)
- Ananta. *Indikator Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*. Bandung :Sumber Ilmu, 1993
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Toha Putra, 1971
- Direktorat Bina Prasarana – Ditjen Perikanan, 1994 :Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 16/MEN/2006.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.*Undang – Undang Pelabuhan Perikanan* .Jakarta :Direktorat Bina Prasarana, 2004
- Fandelli. C. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Prinsip Dasar dan Penerapannya Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit Liberty. 1992.
- Hidayat, Azhar. “Analisis pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bulukumba (studi kasus :kawasan pesisir kecamatan Ujung Loe)”. *Skripsi*. Makassar :Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2012.
- Kramadibrata, Soedjono. *Perencanaan Pelabuhan*. Bandung :Penerbit Ganeca Exact, 2002
- Kusmayadi. *Statistika Pariwisata Deskriptif*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Kodoatie, Robert J. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Cet.V; Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2005
- Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*.Yogyakarta :STIE.YKPN, 1997



- Lubis. *Pengantar Pelabuhan Perikanan*. Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2006
- Pane. AB. *Industri Kepelabuhan Perikanan*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. 2006
- Saleh, dalam Subagjo, *Mengelola sampah Kota*.
- Suratmo. F. G. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta :Universitas Gadjah Mada, 1998
- Suryono. A. *Pengantar Teori Pembangunan*. Kerjasama FIA UNIBRAW. Universitas Negeri Malang. Malang : UM Press, 2004
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Wahyudi, Ahmad. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor :Ghalila Indonesia. 2004
- (<http://reza-palepi.blogspot.com/2013/05/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia.html> diakses Rabu, 19 Agustus 2015)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur>, diakses :Rabu, 19 Agustus 2015
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Wita Dwi Astuti Wahid, S.T** Lahir di Kota Makassar tanggal 17 Agustus tahun 1993, ia merupakan anak ke-2 dari-4 bersaudara dari pasangan **Drs. Abd Wahid** dan **Fatmawaty Pasimai** yang merupakan Suku Makassar-Bugis yang tinggal dan menetap di Kabupaten Bulukumba. Ia menghabiskan masa pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Tunas Harapan Bangsa pada tahun 1998-1999.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 146 Mattoanging pada tahun 1999-2005, lalu mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Bontotiro pada tahun 2005-2008 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 10 Makassar pada tahun 2008-2011. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur Undangan dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya pada tahun 2016.